

# PERENCANAAN KEUANGAN YANG EFEKTIF UNTUK MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM



Yusrawati<sup>1</sup>, Januar<sup>2</sup>

## \*Korespondensi:

Email:  
yusrawati59@guru.smp.belajar.id

## Afiliasi Penulis:

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri  
Sjeh M. Djamil Djambek  
Bukittinggi, Indonesia

## Riwayat Artikel:

Penyerahan: 18 September 2024  
Revisi : 30 Oktober 2024  
Diterima : 29 November 2024  
Diterbitkan: 31 Desember 2024

## Kata Kunci:

Perencanaan, Keuangan,  
Efektif, Pendidikan Islam

## Keyword:

Planning, Finance,  
Effective, Islamic  
Education

## Abstrak

Lembaga pendidikan Islam sering menghadapi tantangan terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan karena belum semua lembaga pendidikan dapat membuat analisis kebutuhan. Selain itu, sulitnya membagi anggaran yang tersedia karena terbatasnya anggaran yang ada serta belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, langkah-langkah perencanaan keuangan, dan manfaat perencanaan keuangan yang efektif bagi lembaga pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah *library research*, data dianalisis dengan mengumpulkan berbagai informasi dari buku, jurnal, dan sumber lain yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang dapat digunakan yaitu dana BOS, iuran komite, dan sumber lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat memanfaatkan waqaf sebagai sumber pendanaan pendidikannya. Terdapat lima prinsip pengelolaan dana pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Langkah dalam perencanaan keuangan yaitu memetakan tujuan, menganalisis kebutuhan, menyusun anggaran, melakukan monitoring secara berkala, dan melibatkan semua. Perencanaan keuangan bermanfaat untuk memastikan ketersediaan dana bagi kebutuhan utama, pengelolaan anggaran yang transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi lebih besar dalam mendukung program pendidikan yang berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik dan moral.

## Abstract

Islamic educational institutions often face challenges related to financial planning and management because not all educational institutions can carry out needs analysis. Apart from that, it is difficult to divide the available budget due to the limited existing budget and not involving various interested parties. This research aims to determine the sources, principles of financial management, financial planning steps, and the benefits of effective financial planning for Islamic educational institutions. The method used is library research, Data is analyzed by collecting various information from books, journals and other trusted sources. The research results show that the sources of funds that can be used are BOS funds, committee fees and other sources. Islamic educational institutions can utilize waqf as a source of funding for their education. There are five principles for managing education funds, namely the principles of justice, efficiency, transparency and accountability. The steps in financial planning are mapping goals, analyzing needs, preparing a budget, carrying out regular monitoring, and involving everyone. Financial planning is useful for ensuring the availability of funds for primary needs, transparent and accountable budget management, thereby increasing public trust and encouraging greater participation in supporting sustainable education programs, as well as strengthening contributions in producing a generation that is academically and morally superior.

## PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam sebagai institusi yang berdedikasi pada pengembangan pendidikan berbasis nilai – nilai Islam, memiliki tujuan utama untuk mencetak individu yang seutuhnya (insan kamil). Lembaga ini berfungsi sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan spiritualitas yang kuat (Zulham, 2020). Keberhasilan Lembaga – lembaga pendidikan Islam dalam mencetak lulusan berkualitas tinggi dapat dikaitkan erat dengan pengelolaan keuangan yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu standar penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Ardiansyah et al., 2023).

Lembaga pendidikan Islam sering menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan dalam bidang keuangan. Permasalahan yang sering muncul antara lain: dengan bertambahnya jumlah siswa maka kebutuhan operasional juga akan semakin bertambah seperti gaji guru, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan alat tulis kantor, pembayaran listrik, internet, air, pelaksanaan dan pengembangan program sekolah, baik yang berkaitan dengan pembelajaran ekstrakurikuler maupun yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang berbasis nilai – nilai Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan biaya yang memadai dalam pengelolaan lembaga pendidikan agar dapat berkembang. Selain masalah biaya yang tersedia, hal yang sangat penting agar lembaga pendidikan bisa beroperasi dan berkembang adalah bagaimana lembaga pendidikan Islam dalam membuat perencanaan yang efektif dan melakukan pengelolaan keuangan seprofesioanl mungkin (Siska Yulia Weni & Isfaiyah, 2024).

Saat ini, belum semua lembaga pendidikan membuat analisis kebutuhan, sehingga masih kesulitan untuk membagi anggaran yang tersedia karena terbatasnya anggaran yang ada, serta belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti komite. Bahkan, di sekolah – sekolah swasta perencanaan pendidikan hanya dilakukan berdasarkan diskusi kepala sekolah bersama bendahara saja tanpa melibatkan komite. Tetapi, setelah perencanaan dirancang, komite diminta untuk menyetujuinya. Apabila hal ini tetap berlanjut, maka akan berdampak kepada tidak terpenuhinya keinginan semua pihak dalam menggunakan dana sekolah sehingga program yang ada tidak memenuhi kebutuhan seharusnya. Selain itu, kurangnya perencanaan anggaran yang terperinci dan transparan mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, keterlambatan pembayaran iuran oleh siswa dan kurangnya diversifikasi sumber pendapatan membuat lembaga sulit memenuhi kebutuhan operasional seperti gaji guru, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan sarana pendidikan. Di era digital, banyak lembaga juga belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, yang mengakibatkan potensi kebocoran anggaran dan sulitnya memantau arus kas secara real – time. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam mewujudkan visi lembaga pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas secara berkelanjutan.

Perencanaan keuangan dalam konteks pendidikan Islam merupakan strategi kunci untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang berkualitas dan bernilai ibadah. Perencanaan keuangan yang matang memungkinkan lembaga pendidikan untuk menyediakan sumber daya yang memadai baik dalam penyediaan infrastruktur, tenaga pengajar, maupun kegiatan – kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan, sehingga diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Aspek finansial memiliki peran yang signifikan dalam keberlangsungan proses pendidikan. Hidayat dan Wijaya dalam Kartika et al. (2023) menegaskan bahwa komponen keuangan

merupakan faktor produksi yang esensial dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setiap aktivitas pendidikan memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang optimal menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan lembaga pendidikan. Pembiayaan pendidikan menuntut pengelolaan yang profesional dan proporsional. Namun, ketersediaan dana yang cukup bukanlah satu – satunya faktor penentu keberhasilan, hal yang lebih penting yaitu bagaimana kemampuan manajemen dalam mengelola dana tersebut sehingga efektif dan efisien (Siska Yulia Weni & Isfaiyah, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Dewi Afja (2024) dengan judul "Analisis Sumber Pendanaan Pendidikan dalam Pembiayaan dan Pengelolaan di SMA Negeri 3 Bukittinggi" menunjukkan bahwa eksistensi dan peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi sangat ditentukan oleh pemahaman yang mendalam terhadap sumber pembiayaan dan sistem pengelolaan yang efektif. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, SMA Negeri 3 Bukittinggi mengelola dana dari berbagai sumber dengan cara yang profesional, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka. Dana BOS, SPP, BKK, dan komite menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Sekolah mengelola dana tersebut secara profesional dan transparan untuk memastikan kualitas pendidikan. Penelitian senada juga dilakukan oleh Siswadi & Nanik Rodiyah, (2024) tentang "Pentingnya Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan". Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan nilai lembaga, tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian lainnya yang mendukung dilakukan oleh Sapitri et al., (2023) tentang "Evaluasi Manajemen Keuangan Pendidikan Islam Metode *Importance Performance Analysis*". Penelitian ini melihat seberapa puas orang tua siswa terhadap layanan dan pengelolaan keuangan di SMA Cendekia. Selain itu, juga mengetahui apa yang diharapkan orang tua siswa agar sekolah bisa lebih baik lagi di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pendidikan Islam yang berkualitas, sekolah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk wali murid, alumni, dan masyarakat. Kerjasama ini harus melibatkan komunikasi yang aktif dan kreatif untuk mengatasi kendala keuangan yang dihadapi siswa. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui sumber dana lembaga pendidikan islam, (2) mengetahui bagaimana prinsip – prinsip pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam, (3) mengetahui bagaimana langkah – langkah perencanaan keuangan yang efektif di lembaga pendidikan Islam, dan (4) mengetahui manfaat perencanaan keuangan yang efektif bagi lembaga pendidikan Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber – sumber ini dapat berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, abstrak, indeks, dan hasil penelitian terdahulu (Sugiyono, 2010). Untuk menganalisis data dalam penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari buku, jurnal, dan sumber lain yang terpercaya. Informasi ini kemudian dikelompokkan berdasarkan topik penelitian untuk mengetahui makna dan hubungan antar informasi tersebut. Kemudian, dibuat kesimpulan berdasarkan hasil analisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### ***Sumber Dana Lembaga Pendidikan Islam***

Alokasi keuangan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang seluruh kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. Jika dana tidak memadai, maka sekolah akan kesulitan menjalankan fungsinya secara optimal. Untuk memastikan ketersediaan dana di sekolah, terdapat beberapa sumber dana yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan Islam atau sekolah. Siska Yulia Weni & Isfaiyah (2024) menjelaskan bahwa beberapa sumber dana yang digunakan untuk menopang operasional sekolah berasal dari beberapa pihak, yaitu pemerintah (misalnya melalui dana BOS), masyarakat (seperti iuran komite, sumbangan orang tua siswa, dan donasi), serta sumber – sumber lain seperti hasil usaha sekolah (kantin, koperasi) dan pendapatan dari aset sekolah. Pendanaan lembaga pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada sumber dana yang telah diatur dalam undang – undang, tetapi juga memanfaatkan potensi wakaf. Wakaf sebagai instrumen yang telah lama dikenal dalam Islam memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan dan keberlangsungan lembaga pendidikan Islam. Pesatnya perkembangan pendidikan Islam saat ini khususnya di sekolah swasta tidak terlepas dari peran besar dana wakaf yang dialokasikan untuk sektor Pendidikan. Wakaf tidak hanya berupa uang, tetapi juga berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum.

#### ***Prinsip – prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam***

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 Ayat (1) telah menggariskan lima prinsip utama dalam pengelolaan dana pendidikan, yakni keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas publik, dan efektivitas. Prinsip efektivitas ini menuntut agar dana pendidikan digunakan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Siska Yulia Weni & Isfaiyah, 2024). Selain prinsip di atas, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yaitu prinsip *muawwamah* yang dikenal dengan prinsip tolong menolong, dan prinsip *syirkah* atau adanya kerjasama, dan prinsip ibadah (Kartika et al., 2023).

#### ***Langkah – langkah Perencanaan Keuangan Efektif di Lembaga Pendidikan Islam***

Perencanaan anggaran di lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain: (1) Memetakan tujuan dan prioritas, artinya lembaga pendidikan Islam harus memetakan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan yang harus diprioritaskan untuk didanai terlebih dahulu atau ditunda pengadaanya. (2) Analisis kebutuhan, lembaga pendidikan Islam memutuskan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, ekstrakurikuler, maupun kegiatan lainnya. (3) Penyusunan anggaran, lembaga pendidikan Islam harus bisa memperkirakan sumber pendanaan yang dari pemerintah, sumbangan orang tua, donatur, maupun hasil dari unit usaha lainnya, serta membagi anggaran ke dalam pos pengeluaran sesuai dengan prioritasnya secara rinci dan jelas. (4) Melakukan monitoring secara berkala, apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana awal atau ada perubahan, serta mengevaluasi penggunaan anggaran apakah akan dilanjutkan atau direvisi sehingga tujuan pendidikan tetap tercapai. (5) Melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Misalnya, komite sekolah ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, serta guru dan karyawan ikut berkontribusi dalam penggunaan anggaran tersebut.

### ***Manfaat Perencanaan Keuangan Efektif Bagi Lembaga Pendidikan Islam***

Perencanaan keuangan yang efektif sangat penting untuk menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan Islam, karena memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal sesuai dengan prioritas operasional dan pengembangan. Dengan perencanaan yang baik, lembaga dapat memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan utama seperti gaji guru, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan bahan ajar yang mendukung pembelajaran berbasis nilai – nilai Islam. Selain itu, perencanaan keuangan yang terstruktur juga membantu lembaga mengantisipasi tantangan finansial, seperti keterlambatan pembayaran iuran atau fluktuasi donasi, sehingga dapat menjaga stabilitas operasional. Lebih jauh, melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, lembaga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi lebih besar dalam mendukung program – program pendidikan. Hal ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lembaga, tetapi juga memperkuat kontribusinya dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik dan moral.

### ***PEMBAHASAN***

#### ***Sumber Dana Lembaga Pendidikan Islam***

Tahap awal dalam proses perencanaan keuangan yang efektif adalah melakukan identifikasi kebutuhan dan perumusan tujuan yang jelas, agar pendidikan berjalan lancar dan berkualitas. Mengidentifikasi sumber dana adalah langkah awal yang sangat penting. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Islam harus melakukan perencanaan keuangan yang matang dengan cara menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas serta sesuai dengan aturan yang berlaku karena ketersediaan dana sangat memengaruhi bagaimana keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah. Ketersediaan dana yang cukup sangat memengaruhi bagaimana terlaksananya program – program yang berkualitas namun jika dana kurang maka program yang bagus pun bisa tidak terlaksana sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah akan terhambat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 49 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan finansial kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan regulasi yang berlaku (Sholahuddin & Sa'diyah, 2024). Lembaga pendidikan Islam saat ini, baik swasta maupun negeri mendapatkan sumber dana pendidikan dari pemerintah. Adapun dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP merupakan dana alokasi khusus berbentuk nonfisik yang dapat digunakan untuk uang biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan (Permendikbudristek, 2023).

Menurut Sulistiyorini dalam Aslindah & Mulawarman (2022), sumber dana pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, dan kontribusi masyarakat baik yang bersifat wajib maupun sukarela. (1) Dana dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan dana BOS ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Dana dari pemerintah daerah. Sumber pendanaan sekolah tidak hanya berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga dari anggaran pemerintah daerah. Sekolah negeri umumnya menerima alokasi anggaran rutin dari pemerintah daerah, sedangkan sekolah swasta sering kali mendapatkan dukungan finansial dalam bentuk dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (3)



Dana masyarakat (orangtua siswa/komite), merupakan sumber pendanaan yang diperoleh sekolah swasta dari masyarakat, terutama orangtua siswa. Dana ini dikumpulkan melalui berbagai mekanisme, seperti biaya masuk siswa baru, sumbangan rutin bulanan, dan iuran pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta iuran untuk kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya. Dana ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan operasional sekolah swasta. (4) Dana lainnya di mana untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan lembaga, sekolah swasta perlu mencari sumber pendanaan tambahan di luar dana pemerintah dan kontribusi orang tua siswa. Beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat dikembangkan antara lain melalui usaha produktif seperti pengelolaan aset sekolah, pemanfaatan wakaf, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha. Siti Asiah Tjabolo dalam Islahudin (2022) menyebutkan bahwa dana pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti zakat untuk jalan Allah, iuran siswa dan orang tua, wakaf, anggaran negara, hibah dari individu, serta sumber – sumber lainnya.

Pendanaan lembaga pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada sumber dana yang telah diatur dalam undang – undang, tetapi juga memanfaatkan potensi wakaf. Wakaf sebagai instrumen yang telah lama dikenal dalam Islam memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan dan keberlangsungan lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum seseorang yang secara sukarela memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus – menerus atau dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Oleh karena itu, wakaf kini menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekolah karena dengan adanya waqaf, kualitas dan perkembangan sekolah dapat ditingkatkan (Simbolon, 2022). Wakaf tidak hanya berupa uang, tetapi juga berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum.

### ***Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam***

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 48 didasarkan pada empat prinsip utama yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip efektivitas juga merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan tersebut (Muhammad Ibnu Faruk Fauzi, 2023). Selain itu, menurut Situmorang et al. (2023), pelaksanaan pengelolaan keuangan wajib berpedoman pada prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel. Prinsip efisiensi, yaitu penggunaan dana pendidikan harus hemat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dapat diselesaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak terlalu banyak. Prinsip efektivitas, yaitu seberapa berhasil pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, dilihat dari kualitas, kuantitas, dan waktu yang direncanakan. Manajemen keuangan yang efektif berarti terlaksananya semua rencana keuangan dengan baik, dan uang yang dikelola dapat digunakan untuk mencapai tujuan Lembaga dengan hasil yang berkualitas. Prinsip transparansi berarti semua keputusan dan tindakan harus dilakukan secara terbuka, mengikuti prosedur yang benar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lembaga tersebut, dan prinsip akuntabel artinya penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sesuai dengan rencana yang telah disusun. Manajemen keuangan yang transparan akan membuat semua pihak, seperti orang tua siswa, guru, dan masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan uang sekolah. Hal ini akan membuat pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip keempat akuntabel yaitu pengelola dana pendidikan harus bertanggung jawab atas

penggunaan dana tersebut dan siap untuk memberikan laporan kepada pihak yang membutuhkan (Limbong, 2021).

Adapun Prinsip dalam pengelolaan keuangan yang baik menurut Lestari et al., (2024) antara lain: (1) Prinsip transparansi, artinya dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam menerapkan adanya keterbukaan yaitu adanya rincian dalam penggunaan dana. Dengan adanya keterbukaan tersebut, pihak yang berkepentingan seperti guru, tenaga pendidik, komite, wali murid, dan pemerintah dapat melihat penggunaan keuangan lembaga pendidikan Islam sehingga mudah dipertanggungjawabkan serta menghindari penyelewengan dana. (2) Prinsip akuntabilitas maksudnya dana yang sudah direncanakan dapat digunakan berdasarkan aturan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas ini mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya kepada seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pendidikan Islam dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan. (3) Prinsip efektivitas yaitu hasil yang diharapkan dari penggunaan dana yang ada sesuai dengan apa yang direncanakan yang dituliskan dalam dokumen perencanaan sekolah. Prinsip ini menekankan bagaimana memaksimalkan apa yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan lebih memprioritaskan apa yang dibutuhkan saat ini yang pengaruhnya signifikan untuk perkembangan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang.

Selain prinsip di atas, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yaitu: (1) *Muawwamah* yang dikenal dengan prinsip tolong menolong. Prinsip ini menekankan adanya saling membantu antar mukmin yang satu dengan yang lainnya dalam hal keuangan. Ini mencerminkan bagaimana akhlak dari seorang muslim terhadap saudaranya. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Maidah Ayat 2 di mana seorang muslim yang satu dengan lainnya diminta untuk saling tolong menolong dalam melaksanakan kebaikan dan taqwa dan dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang muslim untuk bertaqwa kepada Allah dan takut dengan siksaan Allah yang sangat berat. (2) *Syirkah* atau adanya kerjasama. Dalam merencanakan maupun mengelola keuangan harus ada kerjasama dari berbagai pihak sehingga tujuan pendidikan lembaga Islam tercapai. Maksud dari kerja sama adalah adanya pembagaaian tugas yang jelas sehingga setiap orang memiliki tanggungjawab untuk mengelola keuangan. (3) *Ibadah*, maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan harus semata-mata karena Allah sehingga dalam mengelola keuangan pun tidak melakukan kecurangan dan menggunakan uang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan (Kartika et al., 2023).

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai prosedur penyaluran dan pengelolaan dana BOSP. Prinsip dasar dalam pengelolaan BOSP meliputi keterbukaan informasi mengenai sumber dan jumlah dana. Rincian penggunaan dana serta mekanisme pertanggungjawaban harus disajikan secara jelas untuk memudahkan akses dan pengawasan oleh seluruh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tercermin pada kewajiban satuan pendidikan untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait (Lestari et al., 2024)

### ***Langkah-langkah Perencanaan Keuangan Efektif di Lembaga Pendidikan Islam***

Perencanaan keuangan adalah langkah awal yang sangat krusial dalam manajemen keuangan sekolah. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan sekolah hingga masyarakat, untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak dan mencapai

tujuan pendidikan (Sholahuddin & Sa'diyah, 2024). Dengan perencanaan yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan–tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan keuangan yang transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan para donatur dan *stakeholder* lainnya, serta memperkuat akuntabilitas lembaga di mata masyarakat (Aslindah & Mulawarman, 2022). Perencanaan keuangan pendidikan melibatkan proses identifikasi kebutuhan dana, penentuan sumber dana, dan alokasi dana untuk berbagai kegiatan pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan Pendidikan. Adapun tujuan utama pengelolaan keuangan adalah memastikan dana yang tersedia digunakan seefisien mungkin dan semua kegiatan dilakukan sesuai aturan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Kartika et al., 2023b). Perencanaan keuangan lembaga pendidikan melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber, pengendalian pengeluaran, dan pengelolaan investasi. Tujuan utama dari perencanaan keuangan yang baik adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Perencanaan anggaran di lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain: (1) Memetakan tujuan dan prioritas, artinya lembaga pendidikan Islam harus memetakan mana tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang harus diprioritaskan untuk didanai terlebih dahulu atau ditunda pengadaannya. (2) Analisis kebutuhan, lembaga pendidikan Islam memutuskan mana kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya. (3) Penyusunan anggaran, lembaga pendidikan Islam harus bisa memperkirakan sumber pendanaannya apakah dari pemerintah, sumbangan orang tua, dana dari donatur maupun hasil dari unit usaha lainnya serta membagi anggaran kedalam pos pengeluaran sesuai dengan prioritasnya secara rinci dan jelas. (4) Melakukan monitoring secara berkala pelaksanaan anggaran apakah sesuai dengan rencana awal atau ada perubahan serta mengevaluasi penggunaan anggaran apakah akan dilanjutkan atau direvisi sehingga tujuan pendidikan tetap tercapai. (5) Melibatkan semua pihak yang berkepentingan contohnya komite sekolah ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan anggaran serta guru dan karyawan ikut berkontribusi dalam penggunaan anggaran tersebut.

Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran di lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan cara membuat pembukuan yang baik di mana lembaga pendidikan Islam mencatat semua transaksi keuangan secara teratur dan akurat serta memisahkan rekening pendapatan dan pengeluaran agar mudah dipantau dan evaluasi serta membuat laporan keuangan secara berkala sehingga kondisinya dapat diketahui apakah dalam kondisi baik atau tidak. Selain itu, lembaga pendidikan Islam dapat menggunakan aplikasi keuangan untuk memudahkan dalam mengelola data keuangan. Pengelolaan investasi di lembaga pendidikan Islam dengan memilih dan memilih pembelian aset yang tepat. Aset yang dimaksud adalah aset yang mempunyai nilai ekonomi jangka panjang yaitu memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak habis dikonsumsi dalam satu periode akuntansi. Aset ini penting karena mendukung pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah. Contoh aset yang termasuk investasi antara lain bangunan sekolah seperti kelas, mushola, laboratorium, perpustakaan, asrama, peralatan laboratorium seperti komputer dan alat praktikum lainnya, bus sekolah serta meja dan kursi.



Lembaga pendidikan Islam saat ini baik swasta maupun negeri mendapatkan sumber dana pendidikan dari pemerintah. Adapun dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP merupakan dana alokasi khusus berbentuk nonfisik yang dapat digunakan untuk uang biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan (Permendikbudristek, 2023). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di suatu sekolah harus dilakukan secara demokratis dan transparan. Rismanda & Subandoro, (2021) menjelaskan keputusan terkait penggunaan dana BOS harus diambil secara bersama-sama oleh musyawarah administrasi sekolah BOS, Badan Pimpinan Instruktur, dan komite sekolah. Semua keputusan tersebut harus didokumentasikan dengan baik dalam bentuk risalah rapat dan tertuang dalam rencana anggaran sekolah, baik itu RKAS maupun RAPBS. Dana BOS yang diterima sekolah dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional sekolah, termasuk pembayaran gaji guru dan staf, serta kegiatan – kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran.

Perencanaan penggunaan dana juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keberadaan komite sekolah sangat strategis dalam mendukung pendidikan siswa. Kedekatan mereka dengan sekolah memungkinkan mereka untuk memahami secara langsung kebutuhan siswa, termasuk mereka yang mengalami kesulitan finansial. Melalui berbagai program seperti subsidi silang, ta'awun, atau wakaf, komite dapat berperan aktif dalam membantu siswa. Dengan demikian, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Sebagai penasihat, pendukung, pengawas, dan penghubung, komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk aktif terlibat dalam upaya mengatasi masalah pembiayaan sekolah. Bersama dengan orang tua siswa, komite harus berperan dalam menyusun RKAS agar program – program sekolah dapat berjalan lancar (Sapitri et al., 2023).

Sekolah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berbasis pada delapan standar nasional pendidikan. Proses penyusunan RKAS didahului dengan evaluasi diri sekolah untuk mengidentifikasi indikator – indikator yang perlu ditingkatkan guna mencapai kualitas pendidikan yang optimal. Penyusunan RKAS ini melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, dewan guru, dan sebagian mengikutsertakan masyarakat atau wali murid. Anggaran yang terdapat dalam RKAS meliputi anggaran pendapatan dan pengeluaran. Indikator yang memperoleh nilai kurang pada evaluasi diri sekolah menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kegiatan perbaikan. Rekomendasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam rencana pengembangan sekolah dan dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Standar pembiayaan dalam delapan Standar Nasional Pendidikan memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana sekolah harus mengelola keuangannya, mulai dari perencanaan anggaran hingga penggunaan dana untuk berbagai kegiatan yaitu: (1) biaya operasional tidak langsung meliputi pembelian bahan yang habis pakai, (2) biaya operasional langsung meliputi pembayaran gaji atau honorarium guru dan tenaga kependidikan. Biaya ini bisa bersumber dari biaya rutin SPP yang dibayarkan oleh peserta didik. (3) Biaya Investasi meliputi pengembangan sarana dan prasarana. Lembaga pendidikan harus bisa mengembangkan potensi pendanaan lainnya untuk kemajuan sekolah seperti uang pembangunan, uang tahunan, dan dana waqaf yang jika dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber dana yang potensial untuk memajukan sekolah. Sekolah harus memastikan memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi siswa (Hakim & Atoillah, 2024). Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

memberikan pedoman mengenai prosedur penyaluran dan pengelolaan dana BOSP. Prinsip dasar dalam pengelolaan BOSP meliputi keterbukaan informasi mengenai sumber dan jumlah dana. Rincian penggunaan dana serta mekanisme pertanggungjawaban harus disajikan secara jelas untuk memudahkan akses dan pengawasan oleh seluruh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tercermin pada kewajiban satuan pendidikan untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait (Lestari et al., 2024).

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Juknis BOSP, Kepala Satuan Pendidikan selaku penerima dana BOSP berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Penyaluran dana BOSP reguler dibagi menjadi dua tahap, pada tahap awal, maksimal 50% dana alokasi untuk provinsi/kabupaten/kota akan diberikan selama periode Januari hingga Juni. Satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap I (PAUD Reguler, BOS Reguler, atau BOP Kesetaraan Reguler) paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Sedangkan Penyaluran dana tahap kedua akan dilakukan pada semester kedua tahun anggaran Juli – Desember dengan jumlah yang disesuaikan dengan sisa pagu alokasi yang belum terpakai. Untuk laporan keseluruhan penggunaan dana BOS dalam satu tahun anggaran, batas waktu penyampaian adalah tanggal 31 Januari tahun berikutnya (Permendikbudristek, 2023).

Adapun Langkah pertama dalam menyusun anggaran BOSP adalah dengan membuat daftar semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, kegiatan tersebut diurutkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Setelah itu, setiap kegiatan dirinci menjadi program kerja yang lebih spesifik, dan kemudian dihitung kebutuhan biaya untuk setiap program kerja tersebut. Terakhir, ditentukan sumber – sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan. Proses pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan internal dilakukan oleh komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan pengawas sekolah di tingkat kabupaten. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Waruwu et al., 2024).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan harus disusun secara sistematis, akurat, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana BOS dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana BOS dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang (Rismanda & Subandoro, 2021). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015, pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki dua karakteristik utama. (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat sekolah, kemudian naik ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. (2) isi laporan harus mencakup seluruh aspek pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan hingga realisasi penggunaan. Sistem pelaporan yang terstruktur ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS (Waruwu et al., 2024).

Adapun dalam pengelolaan dana waqaf penggunaan harta benda wakaf harus diarahkan pada tujuan – tujuan yang bersifat keagamaan dan sosial, seperti pembangunan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat. Penggunaan harta wakaf harus senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Indonesia, 2004). Kemajuan pengelolaan sistem keuangan

pendidikan Islam pada masa lalu sangat erat kaitannya dengan pengelolaan wakaf. Dengan kata lain, pesatnya perkembangan pendidikan Islam saat itu tidak terlepas dari peran besar dana wakaf yang dialokasikan untuk sektor Pendidikan. Wakaf tidak hanya berupa uang, tetapi juga berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum. Dalam sejarah pendidikan Islam, aset – aset wakaf ini telah menjadi sumber pendanaan yang sangat vital untuk menopang operasional lembaga Pendidikan. Pengalihan harta wakaf umumnya dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh beberapa orang. Dokumen wakaf ini memuat rincian harta yang diwakafkan, ketentuan pengelolaan, serta tujuan penggunaan manfaat wakaf. Selain itu, dokumen tersebut juga menunjuk nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi harta wakaf (Zulham, 2020).

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengamanatkan agar dana wakaf uang yang terkumpul dapat dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi. Tujuannya adalah agar hasil investasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar – besarnya kemaslahatan umat, khususnya bagi golongan mustahik seperti fakir miskin. Dengan demikian, diharapkan dana wakaf dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Wakaf memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan keuangan lembaga pendidikan Islam. Dengan wakaf, lembaga dapat membangun fondasi finansial yang kuat sehingga tidak perlu khawatir dengan ketidakpastian pendapatan. Selain itu, wakaf juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan fasilitas, pemberian beasiswa, dan pelaksanaan program – program inovatif. Pengelolaan wakaf yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan melibatkan pengelola waqaf yang kompeten dan menerapkan prinsip transparansi, lembaga pendidikan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memaksimalkan manfaat wakaf.

Lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar wakaf atau yayasan seringkali mengalami kemunduran akibat buruknya kualitas pengelolaan. Kurangnya profesionalisme dan adanya kepentingan pribadi di kalangan pengurus lembaga pendidikan telah menyebabkan sejumlah kasus penyimpangan dana dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, pada era yang semakin kompetitif ini, pengelolaan wakaf yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan sekolah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing (Simbolon, 2022). Dalam melakukan pengelolaan keuangan pendidikan Islam, terdapat beberapa konsep Islam yang perlu diperhatikan yaitu: (a) transaksi keuangan yang dilakukan tidak dibenarkan adanya riba, (b) menghindari kegiatan yang bernuansa *maysir* (judi), dan transaksi yang tidak ada kepastiannya (*gharar*), (c) penerapan kewajiban zakat atau sedekah, dan (d) ketidakbolehan menggunakan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam (Zulham, 2020).

### ***Manfaat Perencanaan Keuangan Yang Efektif Bagi Lembaga Pendidikan Islam***

Yulfiswandi et al., (2022) menjelaskan perencanaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai kehidupan finansial yang stabil dan sejahtera. Perencanaan keuangan yang baik adalah fondasi bagi keberlangsungan dan pertumbuhan lembaga pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa manfaatnya: (1) Efisiensi pengelolaan dana. perencanaan yang matang, lembaga dapat mengalokasikan dana secara efisien ke berbagai sektor seperti operasional, pendidikan, pembangunan, dan kesejahteraan. Hal ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal. (2) Transparansi dan akuntabilitas. Perencanaan keuangan yang baik mendorong transparansi dalam pengelolaan dana. Laporan keuangan yang jelas dan teratur akan

memudahkan pengawasan dari berbagai pihak, seperti pengurus, donatur, dan masyarakat. (3) Peningkatan kualitas pendidikan. Dengan perencanaan keuangan yang baik, lembaga dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti membeli buku, alat peraga, dan teknologi pembelajaran yang lebih baik. (4) Keberlanjutan Lembaga. Perencanaan keuangan jangka panjang memastikan keberlangsungan lembaga. Dengan mengelola keuangan secara sehat, lembaga dapat menghadapi tantangan ekonomi dan tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. (5) Pengembangan program – program baru. Dana yang dikelola dengan baik memungkinkan lembaga untuk mengembangkan program – program baru yang inovatif, seperti ekstrakurikuler, penelitian, dan pengabdian Masyarakat. (6) Peningkatan kredibilitas. Lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, donatur, dan pihak terkait lainnya.

## KESIMPULAN

Perencanaan keuangan yang efektif sangat diperlukan bagi lembaga pendidikan Islam. Dengan perencanaan yang baik maka diharapkan lembaga pendidikan Islam dapat tetap beroperasi dan berkembang. Ada beberapa sumber dana yang dapat digunakan untuk menopang operasional sekolah yaitu dana dari pemerintah seperti dana BOS, dana yang berasal dari masyarakat seperti iuran komite, sumbangan orang tua siswa, dan donasi serta sumber – sumber lain seperti kantin, koperasi dan pendapatan dari aset sekolah lainnya. Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan waqaf sebagai sumber pendanaan pendidikannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana pendidikan terdapat lima prinsip utama yang harus diterapkan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas publik, dan efektivitas. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan keuangan yang efektif antar lain memetakan tujuan dan menganalisis kebutuhan, menyusun anggaran, melakukan monitoring secara berkala, dan melibatkan semua pihak dalam menyusun perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, lembaga dapat memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan utama seperti gaji guru, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan bahan ajar yang mendukung pembelajaran berbasis nilai – nilai Islam. Selain itu, perencanaan keuangan yang terstruktur juga membantu lembaga mengantisipasi tantangan finansial, seperti keterlambatan pembayaran iuran atau fluktuasi donasi, sehingga dapat menjaga stabilitas operasional. Lebih jauh, melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, lembaga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi lebih besar dalam mendukung program – program pendidikan. Hal ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lembaga, tetapi juga memperkuat kontribusinya dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik dan moral

## REFERENSI

- Ardiansyah, M. N., Mujahidin, E., & Andriana, N. (2023). Perencanaan Keuangan Pendidikan di Lembaga Pendidikan Royatul Qur'an Batam. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 991 – 1003. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.792>
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 2(2), 65 – 74. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>
- Dan, P., Di, P., & Negeri, S. M. A. (2024). *ANALISIS SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN DALAM*.

- Hakim, M. N., & Atoillah, N. (2024). Perencanaan Keuangan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMPN 1 Bangil Pasuruan. *JMPI: Jurnal Manajemen, Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 196 – 205.
- Indonesia. (2004). Undang – undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id*, 1, 1 – 40.
- Islahudin, A. N. (2022). Perspektif Al – Quran Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al – Quran Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana (PP). *Disertasi*, 47.
- Kartika, D., Mujahidin, E., Indra, H., & Andriana, I. N. (2023a). *Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam*. VII(1), 134 – 155.
- Kartika, D., Mujahidin, E., Indra, H., & Andriana, I. N. (2023b). Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam. *JURNAL IDAARAH*, VII(1), 134 – 161.
- Lestari, D., Gani, A. A., Hanifah, L., & Nurkolis. (2024). Prinsip – Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan di Sekolah Menengah di Kabupaten Kendal. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02), 5527 – 5541.
- Limbong, I. E. (2021). Aspek Finansial Pendidikan Islam. *Jurkam: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(3), 147 – 154.
- Muhammad Ibnu Faruk Fauzi. (2023). Pentingnya Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Model Penganggaran Pendidikan. *Journal Innovation In Education*, 1(2), 33 – 43. <https://doi.org/10.59841/inoved.v1i2.198>
- Permendikbudristek. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan a. *Permendikbudristek*.
- Rismanda, A. S., & Subandoro, A. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Swasta. *Jurnal Economics and Sustainable Development Vol.*, 6(1), 43 – 52.
- Sapitri, D., Mujahidin, E., & Andriana, N. (2023). Evaluasi Manajemen Keuangan Pendidikan Islam Metode Importance Performance Analysis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 86 – 107. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v7i1.31350>
- Sholahuddin, & Sa'diyah, M. (2024). Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam di SMA Qur'an Wahdah Cibinong. *Jurnal Pendidikan Guru Journal*, 5(4), 542 – 550.
- Simbolon, Z. (2022). *Pengelolaan Keuangan Berbasis Wakaf Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidik Pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang*. [http://repository.uin – suska.ac.id/61915/](http://repository.uin-suska.ac.id/61915/)
- Siska Yulia Weni, & Isfaiyah. (2024). Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 27 – 38. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.176>
- Siswadi, S., & Nanik Rodiyah. (2024). Pentingnya Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 19 – 26. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.862>
- Situmorang, S., Purba, H., & Tanjung, T. A. (2023). Pengelolaan Keuangan Pendidikan Di Sekolah MAS Pesantren Dairi. <https://Jurnal.Asrypersadaquality.Com/Index.Php/Alittihadu>, 3(3), 204 – 213.
- Waruwu, H., Togatorop, D., Amelia, I., Berutu, J., & Manullang, T. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Parmaksian. *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(5), 1548 – 1559.



- Yulfiswandi, Noviany, I. M., Jongestu, J. C., Keven, Sari, M. I., & Eliya, S. (2022). Pentingnya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan di Usia Muda untuk Masa Mendatang. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 569 – 579. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.4456>
- Zulham. (2020). Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 60 – 73. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1088/983>